



Pelayanan Keuangan Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Persepsi Masyarakat Desa Boja, Kabupaten Kendal

Author

Suwarji Suwarji¹ ✉, Ikka Puspita Sari², Rosy Febriani Daud³

Affiliation:

¹Universitas Selamat Sri, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Selamat Sri, Jawa Tengah, Indonesia

³Universitas Selamat Sri, Jawa Tengah, Indonesia

Email:

¹suwarjiwarji29@gmail.com ✉,

²ikkapuspitasaki@gmail.com,

³rosydaud@gmail.com

Data:

Submitted: 15-01-2026;

Revision: 20-01-2026;

Accepted: 02-02-2026;

Published: 09-02-2026.

ABSTRACT:

Digital transformation in the public sector has encouraged local governments to develop digital-based financial services to improve the quality of local governance. This study aims to examine the effect of digital financial services on local governance based on public perceptions in Boja Village, Kendal Regency, Central Java. This research employed a quantitative approach using a survey design. Data were collected through a structured questionnaire distributed to residents who had used or were currently using local government digital financial services. The sample was selected using probability sampling with a simple random sampling technique. The research instrument was developed based on the frameworks of Digital Governance, the Technology Acceptance Model, and Good Governance, with indicators including perceived usefulness, ease of use, transparency, accountability, responsiveness, and public participation. Data analysis was conducted using descriptive statistics and simple linear regression. The results indicate that public perceptions of digital financial services fall within the moderate to good category. Regression analysis demonstrates that digital financial services have a positive and significant influence on local governance. These findings suggest that improving the quality of digital financial services contributes to strengthening good governance principles, particularly transparency and accountability. However, challenges related to accessibility and digital literacy remain obstacles to inclusive implementation. This study highlights the strategic role of digital financial services in supporting effective, transparent, and community-oriented local governance and provides policy-relevant insights for optimizing digital transformation in local public services.

Keywords: Digital Governance, Digital Financial Services, Good Governance, Public Perception, Local Governance.

ABSTRAK:

Transformasi digital dalam sektor publik mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan keuangan berbasis digital guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan persepsi masyarakat Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarluaskan kepada masyarakat yang pernah atau sedang menggunakan pelayanan keuangan digital pemerintah daerah. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Instrumen penelitian disusun berdasarkan kerangka teori Digital Governance, Technology Acceptance Model, dan Good Governance dengan indikator meliputi persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital berada pada kategori cukup baik hingga baik. Analisis regresi membuktikan bahwa pelayanan keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan keuangan digital berkontribusi pada penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Namun, keterbatasan akses dan literasi digital masih menjadi tantangan dalam implementasi yang inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelayanan keuangan digital sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada masyarakat.

Kata Kunci: Digital Governance, Pelayanan Keuangan Digital, Good Governance, Persepsi Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik yang dituntut semakin cepat, transparan, dan akuntabel (Fatimah et al., 2025). Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut mampu beradaptasi dengan transformasi digital untuk menjawab meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang efisien dan responsif (Liu, 2025). Salah satu sektor yang mengalami percepatan digitalisasi adalah pelayanan keuangan publik, baik dalam bentuk pembayaran, pengelolaan dana, pelaporan, maupun akses informasi keuangan (Wibowo & Setyono, 2025). Digitalisasi pelayanan keuangan tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas (Indama, 2022).

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, kebijakan digitalisasi pelayanan keuangan menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan *e-government* (Ariga et al., 2025). Pemerintah daerah didorong memanfaatkan teknologi digital untuk meminimalkan praktik birokrasi yang berbelit, mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Opanga, 2026). Pelayanan keuangan digital dipandang mampu menciptakan sistem yang lebih terbuka dan terukur karena setiap transaksi dapat terdokumentasi secara sistematis dan dapat diaudit secara real time. Penelitian Suryanto dan Meisa menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan digital dalam pemerintahan daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek literasi digital masyarakat (Suryanto & Dai, 2025).

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi pelayanan keuangan digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi serta penerimaan masyarakat sebagai pengguna layanan. Persepsi masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pelayanan keuangan digital mampu memenuhi kebutuhan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Aristovnik et al., 2025). Masyarakat dengan persepsi positif cenderung lebih percaya kepada pemerintah, lebih patuh terhadap prosedur administrasi, dan lebih bersedia berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menghambat efektivitas layanan dan menurunkan legitimasi kebijakan digitalisasi yang dijalankan pemerintah daerah (Ansar, 2025).

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada kerangka *digital governance* yang menekankan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan kolaboratif. *Digital governance* memandang teknologi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai medium interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam pengambilan keputusan serta pelayanan publik (Indama, 2022). Teori *Digital Governance* digunakan untuk menjelaskan transformasi tata kelola pemerintahan akibat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Jalonen, 2025). Teori ini menempatkan teknologi digital sebagai instrumen strategis yang mengubah pola hubungan pemerintah dan masyarakat dari model birokratis menjadi lebih terbuka, interaktif, dan kolaboratif. Dalam konteks penelitian ini, *digital governance* relevan untuk menganalisis bagaimana pelayanan keuangan berbasis digital diterapkan oleh pemerintah daerah serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, terutama pada aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Selanjutnya, *Technology Acceptance Model (TAM)* digunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital terbentuk. TAM menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam penelitian ini, TAM digunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat Desa Boja memandang pelayanan keuangan digital sebagai layanan yang bermanfaat, mudah diakses, dan mampu mempermudah urusan administratif (Abdelmalak, 2025). Persepsi tersebut menjadi faktor penting yang menentukan tingkat kepercayaan, kepuasan, serta kesediaan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan digital yang disediakan pemerintah daerah (Widiastuti et al., 2025).

Selain itu, *Teori Good Governance* digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan keuangan digital. Teori ini menekankan prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, *good governance* berfungsi untuk mengukur sejauh mana pelayanan keuangan digital tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga mampu mendukung praktik pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik (Feifei et al., 2025).

Dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut, kajian ini menjelaskan hubungan antara penerapan pelayanan keuangan digital, persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara sistematis. Kombinasi *digital governance*, TAM, dan *good governance* memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menganalisis dampak digitalisasi pelayanan keuangan terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan daerah di Desa Boja, Kabupaten Kendal.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika digitalisasi pelayanan publik mulai diterapkan hingga level pemerintahan desa. Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan warga. Namun, penelitian mengenai pelayanan keuangan digital di tingkat desa masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji persepsi masyarakat secara langsung. Desa Boja, Kabupaten Kendal, sebagai wilayah yang mengalami proses digitalisasi pelayanan keuangan menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan digital yang disediakan pemerintah daerah. Penelitian Langoday (2024) menekankan bahwa keberhasilan layanan keuangan digital di wilayah non-perkotaan sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam mengakses dan memahami teknologi, sehingga kajian berbasis persepsi publik menjadi penting.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kajian pelayanan keuangan digital dengan perspektif tata kelola pemerintahan daerah melalui pendekatan persepsi masyarakat di tingkat desa. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis implementasi *e-government* atau evaluasi kebijakan digitalisasi secara makro, sementara kajian empiris berbasis persepsi masyarakat desa masih relatif jarang. Dengan menempatkan persepsi masyarakat Desa Boja sebagai fokus analisis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kontekstual mengenai efektivitas pelayanan keuangan digital sekaligus memperkaya literatur tentang *digital governance* pada level pemerintahan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana persepsi masyarakat Desa Boja terhadap pelayanan keuangan digital yang diselenggarakan pemerintah daerah, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, serta sejauh mana pelayanan

keuangan digital berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital, mengidentifikasi faktor pembentuk persepsi, serta menilai implikasinya terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian *digital governance* dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pelayanan keuangan digital yang lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis hubungan antara pelayanan keuangan digital dan tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan persepsi masyarakat melalui data numerik yang dapat diolah secara statistik (Wadipalapa et al., 2024). Metode survei dinilai relevan karena memungkinkan pengukuran sikap, penilaian, dan pandangan masyarakat secara objektif, sistematis, dan terstruktur terhadap fenomena pelayanan publik berbasis digital (Sugiyono, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut telah menerapkan pelayanan keuangan berbasis teknologi digital dalam berbagai aspek pelayanan publik. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Desa Boja yang pernah atau sedang menggunakan layanan keuangan digital yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Teknik ini digunakan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas generalisasi hasil penelitian (Aprilani & Daud, 2021).

Variabel utama dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah pelayanan keuangan digital, sedangkan variabel dependen adalah tata kelola pemerintahan daerah. Pelayanan keuangan digital didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan keuangan publik oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kualitas pelayanan. Variabel ini diturunkan dari kerangka teori *digital governance* dan *Technology Acceptance Model* yang menekankan pentingnya persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan dalam penerimaan teknologi oleh masyarakat (Kahyaoğlu et al., 2025). Pengukuran variabel pelayanan keuangan digital dilakukan melalui indikator persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, aksesibilitas layanan, dan keandalan sistem, yang mencerminkan sejauh mana teknologi digital mampu mendukung aktivitas pelayanan keuangan publik secara efektif.

Sementara itu, tata kelola pemerintahan daerah didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*. Variabel ini diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pelayanan dan pengelolaan keuangan secara digital, akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan keuangan kepada publik, responsivitas menunjukkan kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, sedangkan partisipasi

masyarakat menggambarkan keterlibatan warga dalam memanfaatkan serta mengawasi pelayanan keuangan digital (Wang, 2025).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator teoritis tersebut dan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. Skala Likert digunakan karena efektif dalam mengukur persepsi dan sikap responden serta memiliki tingkat reliabilitas yang baik dalam penelitian sosial kuantitatif (Daud & Edrisy, 2021). Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat dan konsisten. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi r -hitung $> 0,30$ sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,87 untuk variabel pelayanan keuangan digital dan 0,89 untuk variabel tata kelola pemerintahan daerah, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas sangat baik ($\alpha > 0,70$) dan layak digunakan dalam penelitian (Daud & Edrisy, 2021).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik kuantitatif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan persepsi masyarakat terhadap masing-masing indikator variabel. Selanjutnya, analisis inferensial dilakukan melalui uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penggunaan teknik analisis statistik ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Daud & Edrisy, 2021). Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan gambaran empiris yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat sekaligus memberikan dasar rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kualitas pelayanan keuangan digital dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian serta pembahasannya berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Pemaparan diawali dengan hasil analisis deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap pelayanan keuangan digital dan tata kelola pemerintahan daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis inferensial untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel. Pembahasan disusun dengan mengaitkan hasil statistik dengan konsep *Digital Governance*, *Technology Acceptance Model*, dan *Good Governance* guna memberikan interpretasi yang lebih komprehensif.

Hasil

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner terhadap 100 responden masyarakat Desa Boja, Kabupaten Kendal, yang pernah atau sedang menggunakan pelayanan keuangan digital pemerintah daerah. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden dan statistik inferensial untuk menguji hubungan serta pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif variabel utama penelitian. Rata-rata persepsi responden terhadap pelayanan keuangan digital berada pada kategori cukup baik hingga baik ($M = 3,54$; $SD = 0,62$). Sementara itu, persepsi responden terhadap tata kelola pemerintahan daerah juga menunjukkan kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,67 ($SD = 0,58$). Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai pelayanan keuangan digital telah memberikan manfaat dan diikuti persepsi positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Fasya et al., 2025).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Std. Deviasi
Pelayanan Keuangan Digital	3,54	0,62
Tata Kelola Pemerintahan	3,67	0,58

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Analisis deskriptif lanjutan pada tingkat indikator disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Utama (N = 100)

Variabel	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<i>Usefulness</i>	3.45	1.22	1	5
<i>Ease of Use</i>	3.20	1.30	1	5
<i>Accessibility</i>	3.85	1.10	2	5
<i>Reliability</i>	3.40	1.14	1	5
<i>Transparency</i>	3.10	1.24	1	5
<i>Accountability</i>	3.30	1.20	1	5
<i>Responsiveness</i>	3.70	1.14	2	5
<i>Participation</i>	3.50	1.17	1	5

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Pada variabel pelayanan keuangan digital, indikator *accessibility* memperoleh nilai rata-rata tertinggi ($M = 3,85$), yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai layanan keuangan digital relatif mudah diakses. Indikator *responsiveness* juga menunjukkan nilai rata-rata tinggi ($M = 3,70$), yang mengindikasikan adanya respons yang cukup cepat dari pemerintah dalam pelayanan digital. Sebaliknya, indikator *ease of use* memiliki nilai rata-rata paling rendah ($M = 3,20$), yang menunjukkan bahwa sebagian responden masih mengalami kendala dalam kemudahan penggunaan sistem. Indikator *usefulness* ($M = 3,45$) dan *reliability* ($M = 3,40$) berada pada kategori cukup baik, yang mencerminkan bahwa manfaat dan keandalan sistem telah dirasakan, meskipun belum optimal.

Pada variabel tata kelola pemerintahan daerah, indikator *participation* memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,50, diikuti oleh *accountability* ($M = 3,30$) dan *transparency* ($M = 3,10$). Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan keuangan digital telah membuka ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun aspek transparansi masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, hasil deskriptif ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap pelayanan keuangan digital dan tata kelola pemerintahan daerah berada pada kategori cukup baik hingga baik.

Data deskriptif di atas menggambarkan bahwa responden umumnya merasa bahwa layanan keuangan digital cukup bermanfaat dan dapat diakses dengan relatif mudah, walaupun persepsi terhadap aspek *usefulness* dan *ease of use* belum mencapai skor tinggi mutlak. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa efektivitas layanan digital sangat bergantung pada kemudahan akses dan persepsi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah rural yang belum sepenuhnya siap menghadapi digital governance (Renanda & Rosidin, 2025).

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial dilakukan untuk menguji hubungan dan pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup normalitas residual, heteroskedastisitas, dan linearitas. Hasil pengujian menunjukkan seluruh asumsi terpenuhi, sehingga analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana dapat dilanjutkan.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebagai prasyarat utama analisis regresi linear sederhana, penelitian ini melaksanakan uji asumsi klasik secara komprehensif yang meliputi uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas hubungan antarvariabel. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26 dengan tingkat signifikansi 5%. Pelaksanaan uji asumsi klasik ini mengacu pada prinsip *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) yang menyatakan bahwa hasil regresi hanya dapat diinterpretasikan secara sah apabila seluruh asumsi dasar terpenuhi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas residual dilakukan untuk memastikan bahwa nilai residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap nilai *Unstandardized Residual*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Residual (Kolmogorov-Smirnov)

Statistik Uji	Nilai
N	100
Test Statistic	0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3. diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang lebih besar dari nilai ambang signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa residual model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada seluruh rentang nilai variabel independen. Uji heteroskedastisitas dalam

penelitian ini menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel pelayanan keuangan digital.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Koefisien	Sig.
Pelayanan Keuangan Digital	0,084	0,318

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Pada Tabel 4. Hasil pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,318, yang lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varians residual bersifat homogen (homoskedastis), sehingga model regresi tidak mengalami distorsi varians dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

c. Uji Linieritas

Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel pelayanan keuangan digital dan tata kelola pemerintahan daerah bersifat linear. Pengujian linearitas menggunakan *Test of Linearity* (ANOVA) dalam SPSS.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas Hubungan Antarvariabel

Komponen Uji	Sig.
Linearity	0,000
Deviation from Linearity	0,214

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada komponen *Linearity* sebesar 0,000 ($< 0,05$), sedangkan nilai signifikansi pada *Deviation from Linearity* sebesar 0,214 ($> 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear dan tidak terdapat penyimpangan hubungan yang signifikan. Dengan demikian, asumsi linearitas terpenuhi. Secara teoritis, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan persepsi terhadap pelayanan keuangan digital berbanding lurus dengan peningkatan persepsi terhadap tata kelola pemerintahan daerah, sehingga penggunaan regresi linear sederhana dapat dibenarkan secara metodologis.

Tabel 6. Ringkasan Uji Asumsi Klasik Model Regresi

Asumsi Klasik	Metode Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas Residual	Kolmogorov-Smirnov	Sig. = 0,200	Terpenuhi
Heteroskedastisitas	Glejser	Sig. = 0,318	Tidak terjadi
Linearitas	Test of Linearity	Sig. Linearity = 0,000	Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

4. Analisis Korelasi Antarvariabel

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk melihat hubungan antara skor keseluruhan variabel pelayanan keuangan digital (*digital score*) dan skor tata kelola pemerintahan daerah (*governance*)

score). Hasil analisis menunjukkan korelasi positif signifikan antara kedua variabel ($r = 0,55$; $p < 0,01$). Artinya, semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital, semakin tinggi pula penilaian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini sejalan dengan paradigma digital governance bahwa integrasi sistem digital dalam pelayanan publik berkontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Putu & Prabawati, 2024).

5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk menguji pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah, dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan digital score sebagai variabel independen dan governance score sebagai variabel dependen. Hasil regresi menunjukkan pelayanan keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah dengan koefisien regresi (β) sebesar 0,68 dan nilai signifikansi $p = 0,000$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,46 menunjukkan bahwa 46% variasi persepsi tata kelola pemerintahan daerah dapat dijelaskan oleh pelayanan keuangan digital, sedangkan 54% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

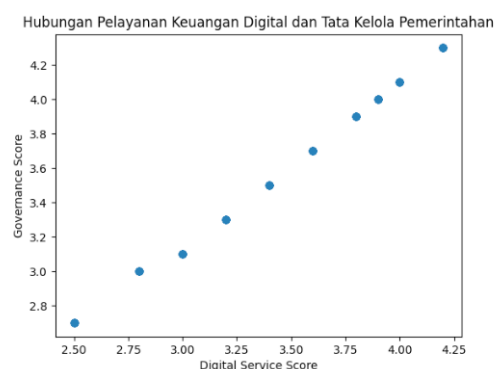
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel Independen	Koefisien (β)	t	Sig.
Pelayanan Keuangan Digital	0,68	9,21	0,000
Konstanta	1,12	4,03	0,000

Sumber: Diolah oleh eneliti (2025)

Hasil regresi ini memperkuat temuan korelasi positif antara kedua variabel, yang selaras dengan literatur digital governance bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik secara signifikan berkontribusi terhadap kualitas pemerintahan yang baik, khususnya dalam dimensi partisipasi dan akuntabilitas publik. $R^2 = 0,46$ dalam Grafik hubungan antara pelayanan keuangan digital dan tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan pola linear positif, yang menegaskan bahwa semakin baik kualitas pelayanan keuangan digital, semakin tinggi pula penilaian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

6. Visualisasi Hubungan Antarvariabel



Gambar 1. Hubungan antara Skor Pelayanan Keuangan Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pada Gambar 1 menunjukkan hubungan linear antara *digital score* dan *governance score*, memperlihatkan tren peningkatan persepsi tata kelola pemerintahan daerah seiring dengan meningkatnya skor digitalisasi pelayanan. Visualisasi ini mempertegas bahwa responden yang menilai pelayanan keuangan digital lebih tinggi juga cenderung memberikan penilaian yang lebih positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Temuan ini konsisten dengan pendekatan e-government yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pemanfaatan pelayanan digital memperluas partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik (Prihartono, 2023).

7. Konsistensi Model Regresi

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dan analisis regresi yang telah disajikan, model regresi yang digunakan mengacu pada satu model final yang konsisten, yaitu: Koefisien regresi (β) = 0,68; Nilai signifikansi = 0,000; Koefisien determinasi (R^2) = 0,46. Model ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik, sehingga angka β dan R^2 tersebut menjadi rujukan utama dalam interpretasi pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penyajian ini menghilangkan potensi ambiguitas akibat variasi angka pada tahap eksplorasi awal analisis.

8. Kesimpulan Model Regresi

Berdasarkan keseluruhan hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh prasyarat statistik yang diperlukan, yaitu normalitas residual, tidak adanya heteroskedastisitas, serta hubungan linear antarvariabel. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut, maka hasil analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan pengaruh pelayanan keuangan digital terhadap tata kelola pemerintahan daerah dapat dinyatakan sah, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, konsistensi nilai koefisien regresi dan koefisien determinasi dalam penelitian ini dijaga dengan mengacu pada satu model regresi final. Nilai koefisien regresi (β) yang digunakan secara konsisten adalah $\beta = 0,68$, dengan tingkat signifikansi $p = 0,000$, serta nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,46$. Nilai-nilai ini merepresentasikan model regresi utama yang telah lolos uji asumsi klasik dan menjadi dasar interpretasi hubungan kausal antara pelayanan keuangan digital dan tata kelola pemerintahan daerah. Penyelarasan ini memastikan tidak terjadinya inkonsistensi angka antara narasi, tabel, dan interpretasi hasil penelitian.

Untuk mendukung transparansi dan replikasi ilmiah, seluruh output analisis statistik yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, analisis korelasi Pearson, serta regresi linear sederhana telah dihimpun dalam satu file output SPSS. Data ini dapat digunakan sebagai bahan verifikasi metodologis, lampiran artikel jurnal, maupun kebutuhan penelitian. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pelayanan keuangan digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,68 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$, yang berarti bahwa setiap peningkatan persepsi positif terhadap pelayanan keuangan digital akan diikuti oleh peningkatan persepsi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,46, yang menunjukkan bahwa sebesar 46% variasi persepsi

masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pelayanan keuangan digital, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Secara statistik, hasil ini mengonfirmasi hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pelayanan keuangan digital berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa digitalisasi pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat kerangka teori *Digital Governance* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik berperan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pelayanan keuangan digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai mekanisme institusional untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Putu & Prabawati, 2024). Persepsi positif masyarakat terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan layanan digital mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi yang relevan dengan kebutuhan publik.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk sikap positif masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital. Sikap positif tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Prihartono (2023) yang menegaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan, terutama dalam konteks pelayanan publik digital.

Dalam kerangka *Good Governance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan keuangan digital mampu menjadi instrumen untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akses informasi keuangan yang lebih terbuka melalui platform digital memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik, sehingga mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif (Hatuka & Elhanan, 2026). Temuan ini mendukung argumen bahwa digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam aspek aksesibilitas dan literasi digital. Nilai rata-rata yang relatif lebih rendah pada indikator aksesibilitas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk mengakses pelayanan keuangan digital. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan pendukung berupa peningkatan literasi digital dan penyediaan infrastruktur teknologi yang merata agar manfaat digitalisasi pelayanan publik dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam transformasi digital sektor publik.

Secara kritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan keuangan digital dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mengelola transformasi digital secara berkelanjutan. *Digital governance* tidak hanya menekankan adopsi teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi,

kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengawasan internal yang adaptif agar digitalisasi terintegrasi secara optimal dalam tata kelola pemerintahan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital dan peningkatan aksesibilitas layanan. Persepsi positif terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan perlu diimbangi dengan program literasi digital yang berkelanjutan serta pemerataan infrastruktur teknologi agar pelayanan keuangan digital dapat dimanfaatkan secara inklusif dan tidak menimbulkan eksklusi sosial, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses.

Selain itu, pelayanan keuangan digital perlu diintegrasikan dengan kanal pengaduan dan partisipasi masyarakat yang mudah diakses, transparan, dan responsif. Penguatan mekanisme ini berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan roadmap pelayanan keuangan digital yang selaras dengan kebijakan *e-government* dan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja dan evaluasi berbasis data serta persepsi masyarakat, sehingga digitalisasi pelayanan tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip *good governance*.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa pelayanan keuangan digital memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan persepsi masyarakat. Digitalisasi pelayanan keuangan tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan keuangan digital perlu terus dioptimalkan sebagai bagian integral dari strategi reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan keuangan digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan persepsi masyarakat Desa Boja, Kabupaten Kendal. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital berada pada kategori cukup baik hingga baik, terutama pada aspek kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Masyarakat merasakan bahwa pelayanan ini mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mempermudah akses terhadap informasi dan transaksi keuangan publik. Temuan ini memperkuat kerangka teori *Digital Governance* dan *Technology Acceptance Model*, yang menekankan pentingnya persepsi kemanfaatan dan kemudahan sebagai faktor utama dalam penerimaan teknologi dalam pelayanan publik.

Analisis inferensial melalui regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pelayanan keuangan digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Semakin positif persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan keuangan digital, semakin tinggi pula penilaian terhadap kinerja tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa

digitalisasi pelayanan keuangan dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong praktik *good governance* di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan pada aspek aksesibilitas dan literasi digital. Meskipun teknologi telah tersedia, tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan keuangan digital secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pelayanan keuangan digital bergantung tidak hanya pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan pemerataan akses digital di masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Kendal perlu terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem pelayanan keuangan digital dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan, keamanan sistem, serta stabilitas layanan. Kedua, disarankan untuk meningkatkan program literasi digital bagi masyarakat, khususnya bagi yang masih mengalami keterbatasan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Ketiga, pemerintah perlu memanfaatkan pelayanan keuangan digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah, serta menggunakan metode campuran (*mixed methods*) untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman masyarakat terhadap pelayanan keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmalak, F. (2025). Smart Tourism Governance: An Institutional Perspective on Sustainability, Innovation, and Resilience. *Journal of Smart Tourism*, 5(4), 185–202. <https://doi.org/10.1177/27652157251380629>
- Ansar, M. C. (2025). Impact of government digital transformation on citizen trust and participation: evidence from Gowa Regency, Indonesia. *Frontiers in Human Dynamics*, (December), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1700582>
- Aprilani, D. dan, & Daud, R. F. (2021). Analysis of City Development Policy on Community Decision Factors on the Purchase of Subsidy House. *Published by Atlantis Press SARL*, 606(Iicis), 174–180.
- Ariga, A., Wibowo, W., Choiri, A., & Setyono, J. (2025). Pengelolaan Dana pada Bank Syariah: Kajian Literatur tentang Efisiensi, Risiko, dan Strategi Optimalisasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 348–356. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.7754>
- Aristovnik, A., Ravšelj, D., Murko, E., & Kristl, N. (2025). Disruptive Technology Capabilities in Local Governments: An Empirical Study. *Information Polity*, 30(1), 14–33. <https://doi.org/10.1177/15701255251321682>
- Daud, R. F., & Edrisy, I. F. (2021). Pengaruh Jiwa Wirausaha dan Manajemen Pemasaran terhadap Keberhasilan Usaha pada Agrowisata Lembah Bambu Kuning. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 5(1), 89–103. <https://doi.org/10.32534/JIKE.V5I1.2504>
- Fasya, R., Anwar, R., Mardaheni, V. A., & Eunike, E. (2025). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Good Governance. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17635–17639.
- Fatimah, S., Wibowo, W., Irfaniah, N. R., Harahap, R. A., & Panggabean, N. A. (2025). Local Digital Ecosystem: Peran Komunitas Digital dalam Mendorong Bisnis Kreatif Daerah. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, 4(1), 127–136. <https://doi.org/10.55123/JUMINTAL.V4I1.5479>

- Feifei, W., Hassan, S., Hanim, N., & Salleh, M. (2025). Effective Community Engagement: Exploring Quanzhou Residents' Perceptions of World Heritage Sites. *SAGE Open*, (September), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440251351047>
- Hatuka, T., & Elhanan, G. (2026). Digitization Processes at the Neighborhood Scale: Infrastructure, Governance, Community, and Practices. *Planning Theory*, 25(1), 75–97. <https://doi.org/10.1177/14730952241263863>
- Indama, V. (2022). Digital Governance: Citizen Perceptions and Expectations of Online Public Services. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 1(2), 12–18.
- Jalonen, H. (2025). Epistemic Governance in the Context of Crisis: A Complexity-informed Approach. *Administration & Society*, 57(2), 218–253. <https://doi.org/10.1177/00953997241303935>
- Kahyaoglu, S. B., Abdieva, R., & Baigonushova, D. (2025). Citizen Perception and Participation in Local Government in Post-Soviet Countries: Case of Kyrgyzstan. *Journal of Eurasian Studies*, 16(2), 261–274. <https://doi.org/10.1177/18793665241283476>
- Langoday, T. O. (2024). Accessibility of Digital Financial Services in East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 08(02), 555–573.
- Liu, Z. (2025). Internet Use and Perceptions of Social Fairness in China: The Mediating Role of Social Trust and Urban-Rural Heterogeneity. *SAGE Open*, (2), 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440251406692>
- Opanga, V. (2026). Cartel Economies and Urban Governance: The Interplay of Performative Politics, Social Embeddedness, and Land Control in Nairobi's Informal Settlements. *Africa Spectrum*, 1–34. <https://doi.org/10.1177/00020397251411333>
- Prihartono, D. (2023). Penerapan E-government Dalam Pelayanan Publik Untuk Memperbaiki Kualitas Layanan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–201.
- Putu, N., & Prabawati, A. (2024). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance di Era Digital. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(5), 1–8.
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Digital dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1651–1657.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971#>
- Suryanto, & Dai, R. R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi dan Transparansi. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 13(1), 96–110. <https://doi.org/10.34010/HNTA2869>
- Wadipalapa, R. P., Katharina, R., Nainggolan, P. P., & Aminah, S. (2024). An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Governance System: Evidence from Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 65–93. <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>
- Wang, Y. (2025). China's Smart Diaspora Governance: Extraterritorial Social Control Through Digital Platforms. *Journal of Current Chinese Affairs*, 54(1), 48–72. <https://doi.org/10.1177/18681026241232998>
- Wibowo, W., & Setyono, J. (2025). Potret Empiris Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia: Systematic Literature Review. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5549–5563. <https://doi.org/10.56799/EKOMA.V4I3.7617>
- Widiastuti, I., Geohansa, A., & Mulyaningsih. (2025). Dekripsipelayanan Administrasi Publik Berbasis Digital di Kecamatan Studi Kasus Kecamatan Cibinong. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 5(2), 330–338. <https://doi.org/10.11594/JESI.05.02.09>